



Penolakan Israel terhadap Bantuan Kemanusiaan WCC-EAPPI

Aviarma Yuanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The World Council of Churches (WCC) is an institution that accommodates Christian unity throughout the world. WCC brings together churches, denominations and church fellowships in more than 110 countries and territories throughout the world, representing more than 500 million Christians. As a religious organization, WCC has a program that focuses on humanitarian assistance, named Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel (EAPPI). But since 2016, this WCC-EAPPI's humanitarian assistance has been refused by Israel. This refusal resulted in many losses especially for conflict victims. This research aims to find out the reasons for Israel that refuses the existence of WCC-EAPPI humanitarian assistance. By using aspects of the humanitarian diplomacy concepts, it can be explained by the reason that Israel refused WCC-EAPPI humanitarian assistance. In this refusal, it is inseparable from the perspective, performance and principles of the WCC-EAPPI itself. The suitability of WCC-EAPPI activities with humanitarian diplomacy aspects deserves to be highlighted in explaining the refusal obtained from Israel.

Keywords : *humanitarian assistance, refusal, conflict victims, WCC-EAPPI, Israel-Palestine*

Pendahuluan

World Council of Churches (WCC) atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai Dewan Gereja se-Dunia adalah organisasi yang paling luas dan inklusif dari banyak organisasi dalam gerakan ekumenis atau oikumene modern yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk kesatuan umat Kristen. WCC menyatukan gereja, denominasi dan persekutuan gereja di lebih dari 110 negara dan teritori di seluruh dunia, mewakili lebih dari 500 juta orang Kristen dan termasuk sebagian besar gereja Ortodoks dunia, sejumlah gereja Anglikan, Baptis, Lutheran, Methodis dan *Reformed*, juga banyak gereja Independen (oikumene.org, 2018).

Sebagai organisasi keagamaan, WCC memiliki program yang berfokus kepada kemanusiaan. Program tersebut adalah *Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI)*. EAPPI yang diprakarsai oleh WCC mengimplementasikan *peacebuilding* dengan memberikan kehadiran 25-30 *Ecumenical Accompanier* atau pendamping ekumenis¹

¹Ekumenis diambil dari istilah Ekumenisme (biasa disebut oikoumenisme, oikumenisme) berasal dari bahasa Yunani oikos (rumah) dan menein (tinggal), sehingga oikumene berarti "rumah yang ditinggali" atau "dunia yang didiami". Kata ini digunakan terutama sekali dalam kaitan dengan (dan oleh) agama Kristen untuk merujuk

secara berkala, yang melayani di lapangan selama tiga bulan dalam menemani masyarakat, juga menawarkan kehadiran yang melindungi, dan menyaksikan perjuangan dan harapan sehari-hari masyarakat, terutama orang yang menjadi korban konflik (eappi.org).

Kegiatan dari EAPPI diantaranya adalah memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional; mendukung aksi perlawanan tanpa kekerasan bersama aktivis lokal Palestina dan Israel; menawarkan perlindungan melalui kehadiran non-kekerasan; terlibat dalam advokasi kebijakan publik; berdiri dalam solidaritas dengan gereja-gereja dan semua orang yang berjuang (jfjfp.com, 2017).

Meskipun WWC-EAPPI adalah program yang berfokus pada kemanusiaan, pada dasarnya WCC-EAPPI bukanlah organisasi yang diakui, terutama oleh Israel. Hal ini menarik karena organisasi kemanusiaan yang tujuannya dapat membantu mengatasi situasi korban konflik di antara kedua negara, justru tidak diakui. Bahkan tidak jarang aktivis WCC-EAPPI harus berkonfrontasi dengan pemukim dan tentara Israel (ngo-monitor.org, 2017).

Sejak tahun 2016 hingga Januari 2018, terdapat sekitar 30 orang yang terlibat dalam WCC-EAPPI harus mendapatkan penolakan akses masuk dan dideportasi oleh pihak Israel (Haaretz, 2018). Maka dari itu para, aktivis WCC-EAPPI dibawa masuk ke wilayah Israel-Palestina dengan menggunakan visa turis biasa untuk bisa melaksanakan aktifitasnya (ngo-monitor.org, 2017).

Berangkat dari fakta bahwa WCC-EAPPI mendapatkan penolakan akses masuk oleh Israel, maka sangat menarik untuk diketahui mengenai alasan penolakan Israel terhadap bantuan kemanusiaan WCC-EAPPI. Dalam hal ini akan menganalisis penyebab WCC-EAPPI tidak diperbolehkan memberikan bantuan kemanusiaan oleh pihak Israel.

Konsep yang dipakai dalam menganalisa masalah ini diambil dari konsep *humanitarianisme*. *Humanitarianisme* diambil dari kata *humanitarian* mengacu tentang seseorang yang mempromosikan kesejahteraan manusia dan reformasi sosial. *Humanitarian* lebih memfokuskan tentang tindakan seseorang dalam kegiatan kemanusiaan. Maka dari itu, *humanitarianisme* adalah pandangan mengenai aksi dan tindakan kemanusiaan dalam membahas isu-isu tentang kemanusiaan, erat kaitannya dengan tindakan nyata yang harus dilakukan untuk menjunjung nilai dari kemanusiaan itu sendiri (Satyari, 2015). Penjelasan ini kemudian dilengkapi oleh *World Health Organization (WHO)* yang mendefinisikan tindakan *humanitarian* adalah pemberian bantuan yang dilakukan atas dasar kesejahteraan manusia (tidak memihak siapapun) untuk menanggapi kebutuhan manusia akibat keadaan politik yang darurat serta bencana alam (who.int, 2008).

Humanitarianisme juga dapat diartikan sebagai keyakinan akan nilai-nilai positif kemanusiaan yang menggarisbawahi pentingnya membantu orang lain yang tengah berada dalam kesulitan. Michael Barnett dan Thomas Weiss (2008) menjelaskan bahwa *humanitarianisme* adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan setelah terjadi adanya bencana; adanya hal ini menjadikan bantuan tersebut hanya diaplikasikan ketika dalam kondisi darurat dan bantuan untuk pemulihan kondisi setelah peperangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *humanitarianisme* tidak dapat dilepaskan dari adanya situasi konflik.

Organisasi WCC adalah organisasi yang terbentuk dengan dasar keagamaan, khususnya agama Kristen Protestan. Secara umum memiliki prinsip mengupayakan persatuan, mempromosikan saksi bersama dalam pekerjaan untuk misi dan penginjilan, terlibat dalam pelayanan Kristen dengan memenuhi kebutuhan manusia, mendobrak rintangan antara orang, mencari keadilan dan perdamaian, dan menegakkan integritas ciptaan (oikumene.org, 2018).

pada gerakan menuju persatuan atau kesatuan denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan praktik.

WCC mengutamakan kemanusiaan tanpa melihat latar belakang agama ataupun ras. Hal ini tentu merupakan prinsip dari konsep Humanitarianisme. Melalui kepeduliannya terhadap kemanusiaan di dalam konflik Israel Palestina, WCC menghadirkan program EAPPI yang lebih fokus di wilayah konflik tersebut. EAPPI ini berkontribusi memberikan rasa aman terhadap korban konflik dan banyak pihak yang mengklaim kehadiran EAPPI mampu meredakan situasi konflik.

Dalam menjalani konsep kemanusiaan di dalam situasi konflik, terdapat juga konsep lain yang dilaksanakan yaitu *Humanitarian Diplomacy*/Diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi penderitaan manusia dalam kondisi krisis kemanusiaan. Tujuan dari diplomasi kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan kehidupan dan mengurangi penderitaan manusia (Smith & Minear, 2007). Dalam prakteknya, kegiatan diplomasi kemanusiaan tentu tidak dapat dilepaskan dari kerangka Hukum Humaniter Internasional yang menjadi instrumen, pijakan sekaligus tujuan untuk memperjuangkan kemanusiaan. HHI bukan sekedar landasan hukum tetapi juga tujuan agar setiap negara mentaati hukum humaniter, sementara kerja para diplomat kemanusiaan ialah memastikan implementasi HHI secara konsisten dan tepat (Sofyan, 2018).

Diplomasi kemanusiaan berkaitan dengan memberikan masukan dan mengajak para pembuat keputusan dan opini pemimpin dalam bertindak di setiap waktu, dengan mengutamakan orang-orang yang rentan, dan tanpa menghilangkan kehormatan prinsip-prinsip fundamental (ifrc.org, 2011). Penggunaan hukum internasional dan kewajiban kemanusiaan digunakan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan atau untuk mempromosikan perlindungan warga sipil dalam keadaan darurat politik yang kompleks (Whitall, 2009).

Terdapat tiga aspek penting di dalam melaksanakan konsep ini (Davey, 2013), yang pertama *Independence*. *Independence* pada dasarnya adalah bentuk tindakan yang dilakukan tidak bergantung pada pihak manapun, dengan kata lain tindakan yang dilakukan berdiri sendiri. Tindakan kemanusiaan harus bersifat otonom dari tujuan politik, ekonomi, militer, atau lainnya yang dapat dipegang oleh aktor apa pun terkait dengan bidang-bidang di mana aksi kemanusiaan sedang dilaksanakan. Kedua, *Imparsial*. *Imparsial* ini merupakan bentuk aksi kemanusiaan harus mencapai seluruh korban yang membutuhkan tanpa mempertimbangkan latar belakang serta posisi dari korban dalam permasalahan tersebut. Tindakan kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kebutuhan, mengutamakan kasus-kasus yang paling mendesak dari penderitaan dan tidak membuat perbedaan berdasarkan kebangsaan, ras, gender, keyakinan agama, kelas atau pilihan politik. Terakhir adalah *netrality*. Konsep *netrality* atau netralitas ini para aktor kemanusiaan tidak boleh memihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi dari sifat politik, ras, agama atau ideologi. Dalam konteks konflik, aspek ini menegaskan tindakan yang dilakukan tidak memiliki kecenderungan pada salah satu pihak yang terlibat konflik. Harus ada upaya yang sama terhadap semua pihak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Jadi sebagai organisasi yang mengutamakan kemanusiaan seharusnya secara penuh melaksakan tiga aspek penting tersebut. Dalam aspek independen, WCC adalah organisasi yang berdiri sendiri tanpa keterlibatan negara lain, terutama negara yang terlibat konflik. Secara imparsial, bantuan dari program WCC-EAPPI tersebar secara menyeluruh, tanpa memandang latar belakang. Namun, netralitas WCC-EAPPI tidak dapat dibuktikan. WCC pada kenyataannya memihak salah satu aktor yang terlibat di dalam konflik. Terbukti dari fakta bahwa WCC-EAPPI mendukung isu pemboikotan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina (Surkes, 2016).

Maka dari itu, tiga aspek penting dalam konsep humanitarianisme ini menjadi landasan untuk menganalisa lebih dalam mengenai tidak diakuinya WCC-EAPPI oleh Israel, meskipun kehadirannya berlandaskan kepada kemanusiaan.

Pembahasan

Pada dasarnya WCC-EAPPI melakukan aktivitasnya dengan model yang dikenal dengan istilah *accompaniment* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pendampingan (eappi.org). Istilah ini secara mendalam bukan saja bermakna sebagai pihak yang mendampingi, namun juga terdapat prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan tersebut.

Bagi WCC-EAPPI, makna pendampingan memiliki beberapa poin yang dapat menjelaskan definisinya secara spesifik, *yang pertama*, pendampingan ini adalah bentuk teoritis dari upaya kemanusiaan di zona konflik. *Kedua*, tentu sebagai organisasi yang berangkat dari nilai keagamaan maka pendampingan ini juga adalah model alkitabiah dari aksi yang menunjukkan jalan Kristus. *Ketiga*, landasan hukum yang dipakai dalam aksi pendampingan ini adalah hukum humaniter internasional. *Keempat*, pendampingan ini harus menggabungkan antara kehadiran secara lokal dengan tekanan secara internasional (eappi.org). Dengan demikian, dalam definisi pendampingan yang dipakai WCC-EAPPI memperjelas aksi yang bagaimana yang dilakukan di wilayah konflik, dalam hal ini adalah wilayah Israel dan Palestina.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan makna pendampingan yang dilakukan oleh WCC-EAPPI di wilayah konflik, maka terdapat juga prinsip-prinsip dasar mengenai pendampingan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah *protective presence, monitoring of human rights violations, standing with local peace and human rights groups, advocacy, principled Impartiality*, dan *nonviolence*(eappi.org). Prinsip-prinsip dasar ini yang menjadi landasan dalam aksi pendampingan WCC-EAPPI.

Prinsip *protective presence* atau kehadiran yang dapat melindungi, memiliki arti bahwa kehadiran WCC-EAPPI memberikan upaya yang membuat konsekuensi pelanggaran hak asasi manusia lebih jelas bagi para pelaku, membujuk mereka untuk bertindak berbeda, dan menghalangi serangan terhadap warga sipil.

Bentuk *protective presence* ini salah satu contohnya adalah sejak April 2012, EAPPI bekerja sama dengan UNICEF telah memantau akses pendidikan bagi anak-anak di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada tahun 2018, *Ecumenical Accompaniers* menyediakan kehadiran pelindung bagi sekitar 4.400 siswa dan 300 guru dengan memantau sembilan sekolah, serta enam pos pemeriksaan yang dilewati oleh anak-anak setiap hari. Kehadiran EA menghalangi tentara dan pemukim dari pelecehan anak-anak dalam perjalanan ke dan dari sekolah (blog.eappi.org, 2018).

Prinsip *monitoring of human rights violations* adalah prinsip yang secara khusus mengawasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah konflik. Ketika kehadiran saja tidak dapat cukup sepenuhnya menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, maka WCC-EAPPI di sana memantau dan melaporkan pelanggaran ini ke PBB dan lembaga hak asasi manusia lainnya (eappi.org).

Prinsip *standing with local peace and human rights groups* adalah prinsip dimana WCC-EAPPI harus bisa bersama-sama dengan pihak-pihak lokal dalam rangka membangun kepedulian terhadap kedamaian dan HAM. WCC-EAPPI membantu memfokuskan perhatian global pada kegiatan kelompok perdamaian Israel dan Palestina, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kapasitas mereka untuk bekerja membangun reformasi (eappi.org).

Dalam rangka menjalani prinsip ini, seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa WCC-EAPPI juga menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi lain dalam mendukung aktifitasnya seperti *B'Tselem* yang merupakan pusat informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan, Lalu ada kelompok *Israel Machsom Watch*, Wanita untuk hak asasi manusia dan terhadap pendudukan, terlibat dalam pekerjaan yang serupa dengan EAPPI, memantau perawatan, mengatakan, pekerja Palestina datang melalui pos pemeriksaan harian dari Tepi Barat untuk bekerja di Israel.

Prinsip *advocacy* adalah prinsip yang tentu saja sesuai dengan kata-katanya yaitu memberikan advokasi bagi korban-korban konflik. Advokasi adalah alat untuk meningkatkan aksi internasional untuk perubahan. WCC-EAPPI membagikan kesaksian saksi mata dengan para pemimpin agama, pembuat keputusan, media, masyarakat sipil, dan pejabat bisnis, sehingga mereka mengubah kebijakan publik demi kebaikan bersama. Peningkatan kesadaran internasional meningkatkan tekanan pada para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan membantu melindungi warga sipil dari pelanggaran-pelanggaran ini (eappi.org).

Berikutnya adalah *principled impartiality*, prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menegaskan bahwa tindakan-tindakan WCC-EAPPI bersifat imparcial, yang artinya tidak memandang latar belakang apapun dan memihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan juga korban-korbannya. WCC-EAPPI tidak pro-Israel atau pro-Palestina dan tidak memihak dalam konflik. WCC-EAPPI adalah murni membela hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun dan berdiri dengan setia kepada orang miskin, tertindas, dan terpinggirkan.

Salah satu bentuk upaya WCC-EAPPI menjaga prinsip ini adalah kerjasamanya dengan *Local Reference Group (LRG)*. LRG memberikan panduan, saran, dan dukungan dengan prinsip penting yaitu adanya dua perwakilan masing-masing dari komunitas Yahudi, Muslim dan Kristen untuk memastikan perspektif lintas agama. Dengan hadirnya LRG maka prinsip imparcial bisa terjaga.

Prinsip terakhir adalah *nonviolence* atau tanpa kekerasan. Seperti diketahui bahwa banyak pihak-pihak yang mengatasnamakan kemanusiaan dan perdamaian tetapi menyertakan pihak militer dalam aksinya, sehingga tercipta kekerasan, tetapi komitmen WCC-EAPPI melalui prinsip ini tentu berbeda. Kekerasan bukanlah pilihan untuk menciptakan kedamaian. Non-kekerasan adalah cara hidup yang menolak penggunaan kekerasan dan berusaha membawa perubahan melalui keterlibatan individu dan kelompok strategi damai. WCC-EAPPI percaya bahwa tanpa kekerasan adalah satu-satunya jalan menuju solusi konflik yang benar dan abadi. Upaya tanpa kekerasan dan dukungan kepada semua orang yang bekerja tanpa kekerasan untuk perdamaian di Israel dan Palestina (eappi.org).

Semua prinsip-prinsip dasar dalam tindakan pendampingan yang dilakukan WCC-EAPPI itu adalah prinsip yang mendasari tindakannya dalam melakukan aksi kemanusiaannya. EAPPI selalu melibatkan diri dalam rangka membangun perdamaian dan menegaskan HAM. Hal ini juga tidak hanya dilakukan sendiri melainkan berdiri bersama-sama pihak-pihak dengan kepedulian yang sama termasuk juga pihak-pihak lokal. Tidak luput juga selalu ada upaya persuasif dan responsif terhadap pelanggaran HAM dan disampaikan atau dilaporkan langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) adalah program yang dibuat oleh WCC yang ditujukan untuk menyatakan kehadiran pihak Internasional pada korban konflik Israel dan Palestina, diciptakan tahun 2002. WCC-EAPPI mengadvokasi keadilan dan perdamaian berdasarkan pendekatan non-kekerasan dan non-partisan. Sudah sekitar 1800 orang pendamping ekumenis (*Ecumenical Accompaniers*) bekerja untuk mengupayakan perdamaian hingga saat ini (eappi.org).

Relawan bermukim di Yanoun, Tulkarm, Jerusalem, Bethlehem, Hebron, dan Jayyous. Relawan menawarkan kehadiran yang protektif kepada komunitas yang rentan, memantau dan melaporkan pelanggaran HAM untuk menciptakan kondisi perdamaian yang adil. Seringkali, bagaimanapun, kegiatan ini memicu konfrontasi dengan pemukim Israel dan tentara Israel (ngo-monitor.org, 2017).

Namun seperti yang sudah dijelaskan bahwa WCC-EAPPI ini mendapatkan pelarangan, maka WCC-EAPPI menjadi organisasi yang tidak terdaftar di Israel atau di luar

negeri. Program ini membawa aktivis internasional ke Tepi Barat melalui penggunaan visa turis biasa (ngo-monitor.org, 2017).

Dengan adanya pelarangan, ada beberapa tahap dalam perekrutan relawan-relawan atau yang disebut EA. Tahap pertama adalah tahap *Apply* atau pendaftaran seperti perekrutan-perekrutan biasanya. Setelah itu akan ada tahap seleksi dan mendapatkan program pelatihan (actforpeace.org.au, 2018). Menariknya, dalam pelatihan ini ada konten mengenai para aktivis ini menerima pelatihan yang mencakup metode untuk mengatasi tentara dan polisi, dan juga berbagai cara-cara untuk melampaui pejabat keamanan dan kepabeanan bandara Israel agar berhasil memasuki negara itu (ngo-monitor.org, 2017).

Setelah mendapatkan pelatihan, para relawan diminta untuk melakukan penerapan di lokasi yang mengalami pendudukan. Setelah selama tiga bulan menjalani program, mereka kembali ke negara masing-masing untuk membagikan semua hal yang mereka alami termasuk kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai pembuat keputusan agar dapat membuahkan kebijakan yang baik terhadap situasi konflik (actforpeace.org.au, 2018).

Selama masa tugas menjalani program ini, banyak hal yang dilakukan untuk merespons situasi konflik dan menjaga pihak-pihak yang menjadi korban konflik. Dalam salah satu prinsipnya sebagai *Protective Presence*, terdapat kasus yang menyita perhatian. Sebagai salah satu contoh pada 31 Agustus 2012, terdapat 24 insiden penolakan akses ke pendidikan didokumentasikan, secara langsung lebih dari 4.000 siswa Palestina. Pada tahun 2011, 39 insiden-insiden seperti itu didokumentasikan, menghasilkan lebih dari 30.000 siswa dan guru (WCC-CCIA, 2013).

Masalah ini mengakibatkan putus sekolah, kurangnya kehadiran, penurunan waktu belajar disekolah, dan penurunan kualitas pembelajaran. Anak-anak perempuan terkena dampak secara tidak proporsional, terutama dalam hal kehadiran sekolah menengah. Perempuan lebih cenderung berhenti menghadiri sekolah ketika menghadapi pelecehan, kekerasan dan intimidasi di pos-pos pemeriksaan atau di perjalanan mereka ke sekolah. Beberapa kekerasan, pelecehan dan intimidasi juga berbasis gender (WCC-CCIA, 2013).

Setelah adanya kehadiran WCC-EAPPI, terdapat laporan yang menunjukkan adanya peningkatan keamanan dalam akses pendidikan. Laporan ini adalah hasil langsung dari proyek bersama antara UNICEF dan EAPPI yang meningkatkan akses ke pendidikan untuk 1.361 anak di enam lokasi yang berbeda di seluruh Tepi Barat yang dipilih secara strategis sebagai intervensi yang perlu untuk membuat lingkungan belajar aman.

Dalam hasil-hasil dalam aksi WCC-EAPPI bertugas membangun perdamaian dan keadilan

Dalam aktifitasnya juga, WCC-EAPPI menyokong dan mempromosikan *Kairos Palestine Document* (2009) yang menyerukan BDS melawan Israel, menyangkal hubungan historis Yahudi dengan Israel dalam istilah teologis, dan menyalahkan Israel sendiri untuk kelanjutan dari konflik. Tujuan dokumen ini adalah untuk menggalang gereja secara global untuk mendukung BDS anti-Israel, delegitimisasi, dan demonisasi. Dokumen Kairos mencakup pembenaran terorisme terhadap warga Israel, menyebutnya "perlawanan hukum". Beberapa partai politik (Palestina) mengikuti cara perlawanan bersenjata. Israel menggunakan ini sebagai dalih untuk menuduh Palestina sebagai teroris dan mampu mendistorsi sifat asli dari konflik, menyajikannya sebagai perang melawan teror Israel, bukan pendudukan Israel (ngo-monitor.org, 2016).

WCC-EAPPI juga secara berkala terlibat dalam advokasi internasional, melobi Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel dan mendorong gereja-gereja di seluruh dunia untuk meningkatkan advokasi yang mungkin mempengaruhi kebijakan luar negeri negara mereka di Timur Tengah. Pada tahun 2013, berusaha untuk memblokir program Horizon 2020, perjanjian yang bertujuan untuk mempromosikan kemitraan Uni Eropa-Israel dalam penelitian ilmiah (ngo-monitor.org, 2017).

Setelah relawan WCC-EAPPI selesai menjalani tugasnya dan kembali ke negara masing-masing, mereka tidak serta-merta diam saja. Justru banyak aktifis yang mempromosikan BDS kepada publik. Pada bulan Mei 2016, di sebuah acara publik di London, seorang aktivis EAPPI berbagi pengalamannya di Hebron. Antara lain, ia menyalahkan "lobi Yahudi" dan pengaruhnya di Amerika Serikat sebagai penjelasan untuk "mengapa umat Kristen Injili tidak simpatik terhadap penderitaan Palestina." Dia juga mendukung "hak pengembalian" Palestina, menyerukan boikot pada produk dan layanan dari Israel, dan mengacu pada pembunuhan warga Palestina Israel di Hebron yang konon memiliki pisau (ngo-monitor.org, 2016).

Pada tahun 2014, EAPPI dan Finn Church Aid mengadakan perjalanan ke kampus-kampus universitas besar di Finlandia, menuduh bahwa Israel mengorbankan dan mendiskriminasi penduduk Palestina dan orang tua yang secara kejam menganiaya anak-anak Palestina (ngo-monitor.org, 2017).

Dalam kasus penolakan Israel terhadap WCC-EAPPI, perlu diketahui kembali bahwa WCC sebagai organisasi utama adalah organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, pada khususnya adalah agama Kristen. EAPPI sendiri menjadi sebuah program yang menjadi perpanjangan tangan dari WCC dalam kepedulian membantu korban konflik di Israel-Palestina.

Tujuan dari WCC-EAPPI adalah untuk menyatakan kehadiran pihak Internasional pada korban konflik Israel dan Palestina. WCC-EAPPI juga mengadvokasi keadilan dan perdamaian berdasarkan pendekatan non-kekerasan dan non-partisan. Dalam tujuannya ini WCC-EAPPI memberikan jasanya murni kepada korban konflik.

Maka dengan melihat tujuannya, WCC-EAPPI sudah menjalani prinsip *independence*. Hal ini dikarenakan WCC-EAPPI tidak memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Meskipun dalam kegiatannya WCC-EAPPI memiliki sumber dana yang cukup besar dari banyak pihak, namun WCC-EAPPI murni hanya berpihak pada korban konflik.

Prinsip *independence* dari WCC-EAPPI ini juga dapat dilihat dari latar belakang berdirinya WCC yang merupakan organisasi yang lahir berdasarkan keagamaan. WCC hanya menjadi wadah untuk menyatukan gereja, denominasi dan persekutuan gereja di lebih dari 110 negara dan teritori di seluruh dunia, mewakili lebih dari 500 juta orang Kristen. Tidak ada kepentingan yang bersifat politis dari keberadaan WCC.

Sifat-sifat prinsip *imparsial* dalam WCC-EAPPI ini juga dijalani oleh WCC. Dari prinsip pendampingan yang menjadi prinsip diplomasi kemanusiaan dari WCC-EAPPI juga sudah dijelaskan ada *principled impartiality*, prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menegaskan bahwa tindakan-tindakan WCC-EAPPI bersifat imparsial, yang artinya tidak memandang latar belakang apapun dan memihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan juga korban-korbannya. WCC-EAPPI murni membela HAM dan hukum humaniter internasional. Tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun dan berdiri dengan setia kepada orang miskin, tertindas, dan terpinggirkan.

Bukti sifat *imparsial* dari WCC-EAPPI ini juga adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh WCC-EAPPI untuk menjaga nilai-nilai lokal, yaitu kerjasamanya dengan *Local Reference Group* (LRG). LRG memberikan panduan, saran, dan dukungan kepada WCC-EAPPI dan koordinator nasional. Tugas utama lainnya adalah, memperkuat hubungan dengan gereja-gereja lokal dan organisasi mitra lokal, serta mempromosikan EAPPI WCC di tingkat lokal dan nasional. Aspek yang paling penting dari LRG sehubungan dengan sifat imparsial adalah adanya perwakilan masing-masing dari komunitas Yahudi, Muslim dan Kristen untuk memastikan perspektif lintas agama.

Pada pertemuan WCC di Jenewa, Swiss, 26 Agustus - 2 September 2009 terdapat beberapa pernyataan yang dibuat. Salah satunya adalah mendesak pemerintah Israel dan

Otorita Palestina untuk mempertimbangkan kedaulatan politik mereka sendiri di tanah suci dengan tempat-tempat suci untuk tiga agama monoteistik dan terus melibatkan "Dewan Institusi Keagamaan Tanah Suci" dalam proses perdamaian dan khususnya mengenai status Yerusalem dan tempat-tempat suci. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa WCC tidak hanya mementingkan diri sendiri. WCC menunjukkan kepeduliannya terhadap agama-agama lain.

Dalam pembahasan mengenai prinsip netralitasnya, seperti yang dituliskan pada hipotesis, bahwa ada dugaan WCC-EAPPI tidak menjalankan secara penuh prinsip netralitas. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai bukti mengenai adanya keberpihakan dari WCC-EAPPI dalam programnya membantu korban konflik.

Berdasarkan konvensi Jenewa 2001 terdapat pernyataan WCC yang yakin akan perlunya boikot internasional terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah-wilayah pendudukan dan untuk gereja-gereja anggota dan setia untuk bergabung dalam aksi-aksi perlawanan tanpa kekerasan terhadap penghancuran properti Palestina dan pengusuran paksa orang-orang dari mereka.

Seiring berjalannya waktu, muncul kampanye yang cukup besar yang menyudutkan Israel, yakni kampanye yang menyerukan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) sebagai bentuk tekanan non-kekerasan terhadap Israel. Gerakan BDS diluncurkan oleh 170 serikat pekerja Palestina, partai politik, jaringan pengungsi, organisasi wanita, asosiasi profesional, komite perlawanan populer dan badan masyarakat sipil Palestina lainnya pada tahun 2005.

Boikot yang dimaksudkan adalah penarikan dukungan untuk Israel dan perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM Palestina, serta melibatkan lembaga olahraga, budaya dan akademik Israel. *Divestment*, yaitu mendesak bank, dewan lokal, gereja, dana pensiun dan universitas untuk menarik investasi dari semua perusahaan Israel dan dari perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Sanksi, dimaksudkan untuk menekan pemerintah untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk meminta pertanggungjawaban Israel termasuk dengan mengakhiri perdagangan militer, perjanjian perdagangan bebas dan mengusir Israel dari forum internasional seperti PBB dan FIFA.

Kampanye BDS itu cukup mengganggu keamanan dari Israel, dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu ditandai dengan munculnya tuntutan-tuntutan seperti *Pertama*, mengakhiri pendudukan dan kolonisasi semua tanah Arab dan membongkar Tembok. Hukum internasional mengakui Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, Gaza dan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki oleh Israel. *Kedua*, Mengakui hak-hak dasar warga Arab-Palestina Israel untuk mendapatkan kesetaraan penuh. Seperlima dari warga Israel adalah orang Palestina yang tetap berada di dalam garis gencatan senjata setelah tahun 1948. Mereka tunduk pada sistem diskriminasi rasial yang diabadikan dalam lebih dari 50 hukum yang berdampak pada setiap aspek kehidupan mereka. *Ketiga*, Menghormati, melindungi dan mempromosikan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka sebagaimana ditentukan dalam Resolusi PBB 194.

Hal ini seperti menjadi gayung bersambut, dimana WCC-EAPPI juga memiliki pernyataan yang senada mendukung kampanye BDS. Dalam kegiatannya, WCC-EAPPI menyokong dan mempromosikan *Kairos Palestine Document* (2009) yang menyerukan BDS melawan Israel, menyangkal hubungan historis Yahudi dengan Israel dalam istilah teologis, dan menyalahkan Israel sendiri untuk kelanjutan dari konflik. Tujuan dokumen ini adalah untuk menggalang gereja secara global untuk mendukung BDS anti-Israel, delegitimisasi, dan demonisasi.

WCC-EAPPI juga secara berkala terlibat dalam advokasi internasional untuk melobi Uni Eropa agar menjatuhkan sanksi terhadap Israel dan mendorong gereja-gereja di seluruh dunia untuk meningkatkan advokasi yang mungkin mempengaruhi kebijakan luar negeri

negara mereka di Timur Tengah. Bahkan tahun 2013, berusaha untuk memblokir program Horizon 2020, perjanjian yang bertujuan untuk mempromosikan kemitraan Uni Eropa-Israel dalam penelitian ilmiah.

Kesimpulan

Hal-hal yang dijelaskan itu semua cukup menegaskan adanya keberpihakan dalam posisi WCC-EAPPI sebagai bantuan kemanusiaan. Hal ini tentu saja tidak mengindah prinsip penting dalam diplomasi kemanusiaan, yaitu secara khusus prinsip Netralitas. Dalam prinsip netralitas sebuah gerakan kemanusiaan seharusnya dapat bersifat tidak memihak kepada pihak manapun.

Meskipun hal ini dapat dibantah dengan prinsip EAPPI yang menyebutkan tidak pro-Israel maupun pro-Palestina, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini dapat menjawab alasan Israel melakukan penolakan terhadap WCC-EAPPI. Tentu sebagai negara, Israel berusaha menangkal ancaman-ancaman yang berpengaruh terhadap negaranya, termasuk WCC-EAPPI yang mendukung kampanye BDS.

Dengan serangkaian penulisan yang sudah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa penolakan yang diberikan Israel kepada WCC-EAPPI adalah karena adanya peran WCC-EAPPI yang mendukung kampanye BDS, dimana kampanye BDS ini adalah isu yang sangat berbahaya bagi keamanan Israel baik dari luar negeri dan dalam negeri.

Alasan penolakan ini juga diperkuat kinerja WCC-EAPPI yang terbukti tidak menjalankan prinsip diplomasi kemanusiaan sepenuhnya. Diplomasi kemanusiaan yang dimaksudkan terdapat tiga prinsip dasar yang penting, yaitu Independence, Imparsial, dan netralitas. Secara khusus WCC-EAPPI tidak mengindahkan prinsip netralitas karena terbukti memihak kepada Palestina dan turut mendukung kampanye BDS yang dapat menjatuhkan Israel

Dukungan WCC-EAPPI terhadap kampanye BDS juga tidak terlepas dari pandangan WCC-EAPPI yang menganggap pihak Israel telah melanggar konsensus-konsensus Internasional yang sudah disepakati dan terbukti telah melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Namun, sebagai organisasi yang berbasis agama, WCC-EAPPI menjalankan dengan baik prinsip diplomasi kemanusiaan yang lainnya, seperti menjaga independensinya dengan tidak bergantung pada pihak manapun dan menuangkan kepentingan apapun di dalam konflik. Prinsip imparsial juga diterapkan dengan baik sebagai bantuan kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang apapun, baik agama, suku, atau ras dalam membantu korban konflik.

Referensi

- About us: What is the World Council of Churches?. 2018.
<https://www.oikoumene.org/en/about-us>, diakses 21 April 2018.
- actforpeace.org.au. 2018. Bear Witness. keep watch. build peace. Act For Peace:
<https://www.actforpeace.org.au/EAPPI>, 13 November 2018.
- antaranews.com. Korban tewas akibat konflik di Palestina capai angka tertinggi. 2015,
antaranews.com.
- Barnett, Michael dan Weiss, Thomas G. 2008. Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics. Ithaca: Cornell University Press.
- bdsmovement.net. (n.d.). What is BDS? : Overview. <https://bdsmovement.net/what-is-bds>, diakses 2 Agustus 2018.
- blog.eappi.org. 2018. Ecumenical accompaniers share observations with EU. EAPPI Blog:
<https://blog.eappi.org/category/protective-presence-2/>, diakses 5 November 2018
- blog.eappi.org. (n.d.). Ecumenical accompaniers share observations with EU. EAPPI Blog:
<https://blog.eappi.org/>, diakses 15 November 2018
- Davey, Eleanor., Borton, John., dan Foley, Matthew. 2013. A History of The Humanitarian System: Western Origins and Foundation. HPG Working Paper. London: Overseas Development Institute.
- eappi.org. (n.d.). About : About EAPPI. <https://eappi.org/en/about>, diakses 4 Agustus 2018
- eappi.org. (n.d.). Our Model. EAPPI: <http://eappi.org/en/our-model>, diakses 11 November 2018
- eappi.org. (n.d.). Our model: Results of WCC-EAPPI evaluation presented.
<https://eappi.org/en/our-model>, diakses 21 April 2018.
- Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). 2017.
<http://jfjfp.com/tours/ecumenical-accompaniment-programme-in-palestine-and-israel-eappi/>, diakses 25 Maret 2018.
- Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). 2017.
https://www.ngo-monitor.org/ngos/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_/, diakses 7 April 2018.
- haaretz.com. 2018. Letters to the Editor: 'Alternative Facts' at Tel Aviv's Ben-Gurion Airport.
<https://www.haaretz.com/opinion/letters/letters-to-the-editor-1.5871296>, diakses 3 Agustus 2018.
- Humanitarian Health Action. 2018. <http://www.who.int/hac/about/en/>, diakses 22 April 2018
- mepc.org. (2017). Knesset Approves BDS “Travel Ban” Law. Middle East Policy Council:
<https://www.mepc.org/commentary/knesset-approves-bds-travel-ban-law>, diakses 14 November 2018.
- Minear, Larry dan Simth, Hazel. 2007. Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft. Tokyo: United Nations University Press.
- ngo-monitor.org. NGO Monitor.2016. A Fact Sheet on Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). <https://www.ngo-monitor.org/reports/ecumenical-accompaniment-programme-in-palestine-and-israel-eappi-2/>, diakses 8 Agustus 2018.
- ngo-monitor.org. 2017. Background on Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). NGO monitor: https://www.ngo-monitor.org/reports/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_0/, diakses 10 Agustus 2018.
- ngo-monitor.org. 2017. Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). ngo-monitor: <https://www.ngo->

- monitor.org/ngos/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_/, diakses 7 Agustus 2018.
- oikumene.org. 2009. Resources : Statement on Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. World Council of Churches:
<https://www.oikumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-israeli-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory>, diakses 3 Agustus 2018.
- oikumene.org. 2017. About us : What is the World Council of Churches? . oikumene.org:
<https://www.oikumene.org/en/about-us>, diakses 2 Agustus 2018
- oikumene.org. (2018). About Us: History. World Council of Churches:
<https://www.oikumene.org/en/about-us/wcc-history>, diakses 28 Agustus 2018
- oikumene.org. (2009, September 2). Resources : Statement on Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory World Council of Churches:
<https://www.oikumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-israeli-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory>, diakses 3 Agustus 2018.
- oikumene.org. (2017, March 9). WCC gravely concerned over Israel's travel ban. World Council of Churches: <https://www.oikumene.org/en/press-centre/news/wcc-gravely-concerned-over-israels-travel-ban>, diakses 15 November 2018.
- Satyari, Sagung Alit. 2015. Humanity, Humanisme, dan Humanitarianisme dalam Hubungan Internasional Kontemporer. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Surkes, Sue. 2016. For first time, Israel denies entry to BDS activist.
http://www.timesofisrael.com/for-first-time-israel-denies-entry-to-bds-activist/?fb_comment_id=1204389856307870_1205380949542094#fe8ae48a906a6, diakses 10 May 2018.
- WCC-CCIA. 2013. Education Under Occupation. Geneva: EAPPI.
- What we do: What is Humanitarian Diplomacy?. 2011. <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/>, diakses 22 April 2018.